



**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**

**SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN**

NOMOR : SDM-SM.03.03-01245

Kementerian Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa :



|                         |                                                         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nama                    | : Paulus Katan Tapun, S.H.                              |
| NIP                     | : 198607142018011001                                    |
| Tempat, Tanggal Lahir   | : Malaysia, 14 Juli 1986                                |
| Pangkat/ Golongan Ruang | : Penata Muda Tk.I/ IIIb                                |
| Jabatan                 | : Analis Hukum Ahli Pertama                             |
| Instansi/ Unit Kerja    | : Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI |
| Kualifikasi             | : <b>BAIK SEKALI</b>                                    |

telah memenuhi Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Hukum pada Pelatihan Fungsional Analis Hukum Ahli Pertama Angkatan X Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dari tanggal 9 September sampai dengan tanggal 21 Oktober 2025 di Depok yang meliputi 210 (dua ratus sepuluh) jam pelajaran.

Depok, 21 Oktober 2025  
Kepala Badan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Hukum,

Gusti Ayu Putu Suwardani

## DAFTAR MATA PELATIHAN

### I. Materi Wawasan

1. *Building Learning Commitment*;
2. Perkembangan dan Tuntutan Kompetensi ASN;
3. Penataan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
4. Standar Pelayanan Publik dan Pengelolaan Pengaduan;
5. Kode Etik Analis Hukum;
6. Komunikasi Efektif bagi Analis Hukum.

### II. Materi Inti

1. Klasifikasi Bahan dan Data dalam rangka Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan;
2. Klasifikasi Bahan dan Data dalam rangka Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum Tidak Tertulis;
3. Penyusunan Kerangka Materi dalam rangka Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang terkait Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah;
4. Klasifikasi Bahan dan Data dalam rangka Penyusunan Konsep Perjanjian Instansi Pemerintah;
5. Klasifikasi Dokumentasi dan Informasi Hukum berdasarkan Pembidangan Hukum atau Pembagian Urusan Pemerintahan;
6. Klasifikasi Bahan dan Data dalam rangka Pengelolaan Pelayanan Hukum dan Perijinan;
7. Penyusunan Kerangka Materi Advokasi Hukum dalam Perkara Perdata;

8. Penyusunan Kerangka Materi Advokasi Hukum dalam Perkara Tata Usaha Negara;
9. Penyusunan Kerangka Materi Advokasi Hukum dalam Perkara Uji Materiil Peraturan Perundang-undangan;
10. Penyusunan Kerangka Materi dalam rangka Advokasi Hukum di Luar Pengadilan.

### III. Materi Aktualisasi

1. Pengembangan Karier Fungsional Analis Hukum;
2. Penyusunan Karya Tulis Ilmiah;
3. Aktualisasi Kegiatan Klasifikasi Bahan dan Data, serta Permasalahan Hukum.

Depok, 21 Oktober 2025  
Kepala Pusat Pengembangan  
Pelatihan Fungsional,

Tejo Harwanto